EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING LURAH DALAM OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DIKELURAHAN GALANG KOTA KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG

TUGAS AKHIR

Oleh:

RIO ALZAHARI SEMBIRING
2103100052

Program Studi Ilmu admistrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap	:	Rio Alzahari Sembiring .....
NPM	:	2103100052.....
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Publik.....
Pada Hari, Tanggal	:	Kamis, 28 Agustus 2025.....
Waktu	:	Pukul 08.00 WIB .....s/d Selesai .....

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Dedi Amrizal, S.sos., M.Si..... (.....)

PENGUJI II : Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh.S.sos.MSP (.....)

PENGUJI III : Syafruddin., S.sos., M.H..... (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP	**Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom**

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap	:	RIO ALZAHARI SEMBIRING
NPM	:	2103100052
Program Studi	:	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi	:	EFELTIVITAS FUNGSI CONTROLLING LURAH DALAM OPTIMALISASI PEMAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DIKELURAHAN GALANG KOTA KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG

Medan, 22 Agustus 2025

Pembimbing

SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H
NIDN: 0130056601

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801

Dekan

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

UMSU
Unggul dan Terpercaya

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Rio Alzahari Sembiring**, NPM **2103100052**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 27 Oktober 2025

Yang Menyatakan,

Meterai tempel

Rp. 10.000

METERAI TEMPEL

076ANX095739524

Rio Alzahari Sembiring

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat kuasanya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Serangkai kata terima kasih juga penulis berikan khusus kepada kedua orang tua penulis yang sangat dicintai dan penulis sayangi yaitu ayah penulis Khairul Sembiring dan ibu Selly yang selalu mendoakan, terimakasih sudah bertahan mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis menjalani masa perkulihaan. Ribuan hingga jutaan terimakasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keluarga penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan, kemudahan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal'Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr.Agussani,MA.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharyah, S.Sos, M.Si selaku sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syafruddin, S.Sos, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mempermudah dan memberikan informasi terkait perkuliahan.
9. Kepada seluruh Staff Pegawai Bapenda Kota Medan yang telah membantu penulis dalam hal informasi mengenai kualitas pelayanan di Bapenda Kota Medan.
10. Yang tersayang keluarga besar penulis terimakasih telah memberikan dukungan moral dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Kepada Sahabat Penulis bernama Ario Ivo Rayzikin, Raihan Fahdias, Rizky Akbar Sitorus, Aidil Pramuda Immawan, Fardhan. Sahabat yang menghadapi susah maupun senang selalu ada disamping dan terus bersemangat dalam menggapai impian di masa depan.
12. Tidak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Ilmu Administrasi Publik stambuk 2021 yang sudah bersama-sama melewati proses belajar dan semangat serta bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis skripsi ini selesai. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kash sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING LURAH DALAM OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN DI KELURAHAN GALANG KECAMATAN GALANG KOTA KABUPATEN DELI SERDANG

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Sebagai salah satu instrumen fiskal, PBB berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas pengelolaan PBB. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas fungsi controlling lurah dalam optimalisasi pembayaran pajak bumi bangunan di Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan beberapa informan yaitu Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Lingkungan V Kelurahan Galang Kota. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas dari fungsi controlling berjalan baik dan efektif dalam pembayaran pajak bumi bangunan yang dimana terdapat kerja sama antara lurah dan staf kelurahan serta kepala lingkungan dalam melakukan pengawasan pajak bumi bangunan. Tetapi dengan demikian harus dilakukan evaluasi setiap tahunnya agar kedepannya dapat menjadi bahan dalam pengawasan pajak bumi bangunan.

Kata Kunci : Pajak Bumi Bangunan, Efektivitas, Kelurahan, Optimalisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR LAMPIRAN vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
1.3.1. Tujuan Penelitian 4
1.3.2. Manfaat Penelitian 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II URAIAN TEORITIS 7
2.1. Controling 7
2.1.1. Pengertian Controling 7
2.1.2. Tipe-Tipe Controling 8
2.1.3. Prinsip-Prinsip pengawasan (*Controling*) 11
2.1.4. Fungsi pengawasan (Controling) 12
2.1.5. Tujuan pengawasan (*Conroling*) 13
2.2. Pajak Bumi Bangunan 15
2.3. Tugas pokok dan Fungsi Lurah 16
BAB III METODE PENELITIAN 19
3.1. Jenis Penelitian 19
3.2. Kerangka Konsep 20
3.3. Definisi Konsep 20
3.4. Kategorisasi 22
3.5. Narasumber 23

3.6. Teknik Pengumpulan Data 23
3.7. Teknik Analisis Data 24
3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian 25
3.9. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian 25
BAB IV PEMBAHASAN 28
4.1. Hasil Penelitian 28
4.1.1. Deskripsi Hasil Wawancara 28
4.2. Pembahasan 37
BAB V PENUTUP 44
5.1. Simpulan 44
5.2. Saran 45
DAFTAR PUSTAKA 47
LAMPIRAN 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I SK-1 49

Lampiran II SK- 2 50

Lampiran III SK-3 51

Lampiran IV SK-4 52

Lampiran V Surat Izin Penelitian Dan Surat Balasan Izin Penelitian 53

Lampiran VI Draft Wawancara 54

Lampiran VII Dokumentasi Dengan Ibu Yusmaini, S.Sos 56

Lampiran VIII Dokumentasi Dengan Kepala Lingkungan V Bapak Johan Tanjung 57

Lampiran IX Dokumentasi Dengan Staff Kelurahan 58

Lampiran X Dokumentasi Dengan Lurah Ibu Merry Luciana V. Pasaribu, S.Stp 60

Lampiran XI SK-5 Berita Acara Bimbingan 61

Lampiran XII SK-10 62

Lampiran XIII Loa Keskap 63

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Sebagai salah satu instrumen fiskal, PBB berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, optimalisasi penerimaan PBB masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk di Kelurahan Galang Kota, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang Kota.

Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas pengelolaan PBB. Lurah, sebagai pimpinan di tingkat kelurahan, memiliki fungsi controlling yang mencakup pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap proses pembayaran PBB. Fungsi controlling ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir potensi tunggakan pajak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan fungsi controlling tersebut, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung

pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah. Namun realisasi pendapatan PBB masih kurang optimal di Kecamatan Garankota, Kecamatan Deli Serdan, Kabupaten Garankota. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa target penerimaan PBB seringkali tidak terpenuhi dan masih banyak tunggakan yang belum terbayar. Situasi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan dan pemantauan pembayaran PBB di daerah.

Rendahnya pendapatan PBB salah satunya diduga karena tidak efisiennya fungsi pengelolaan kepala desa. Sebagai pengelola tingkat kecamatan, pengelola kecamatan mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan dan pemantauan serta memastikan seluruh proses pembayaran PBB dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi administratif ini meliputi hubungan masyarakat, pencatatan pajak, pemantauan pembayaran, dan pemrosesan saldo terutang. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan fungsi pengendalian tersebut.

Hambatannya antara lain terbatasnya sumber daya manusia di daerah, rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar PBB, dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan yang efektif. Selain itu, rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB. Situasi ini semakin diperparah dengan lemahnya koordinasi antar kabupaten dan instansi terkait seperti kantor pajak dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan PBB.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana fungsi pengawasan kepala desa dilaksanakan dan seberapa efektif dalam mengoptimalkan pembayaran PBB di Desa Garangkota. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, terdapat risiko penurunan pendapatan daerah yang pada akhirnya menghambat pembangunan daerah dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas fungsi manajemen kepala desa dalam optimalisasi pembayaran PBB dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya pelaksanaan fungsi tersebut.

Dengan memahami situasi tersebut, kajian ini dapat memahami secara jelas permasalahan yang ada dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas fungsi manajemen kepala desa dalam optimalisasi pendapatan PBB Kota Garang. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana fungsi controlling lurah telah dilaksanakan dan bagaimana efektivitasnya dalam meningkatkan pembayaran PBB. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi controlling tersebut, baik dari sisi internal kelurahan maupun eksternal, seperti partisipasi masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai peran lurah dalam pengelolaan PBB

serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas fungsi controlling dalam optimalisasi pembayaran PBB di Kelurahan Galang Kota. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengelolaan PBB yang lebih efektif dan efisien.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah bagaimana efektivitas fungsi controlling lurah dalam optimalisasi pembayaran pajak bumi bangunan di kelurahan galang kota kecamatan galang kabupaten deli Serdang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas fungsi controlling dalam optimalisasi pembayaran pajak bumi bangunan di kelurahan galang kota kecamatan galang kabupaten deli Serdang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan bahwa penelitian ini memberikan manfaat pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung,

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penelitian tentang Fungsi Pengawasan *(controlling)* dalam pembayran pajak bumi bangunan dikelurahan galang kota
b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi kelurahan galang kota kususnya dalam pembayran pajak bumi bangunan dalam pengawasan
c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu penegtahuan bagi penulis dan sebagai satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis maka dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori-teori yang bersangkutan dengan Controlling dan Pajak Bumi Bangunan serta pengertian-pengertiannya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang diterapkan, termasuk jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui metode penelitian data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan Kesimpulan dan saran yang didasari pada hasil penelitian.

BAB II
URAIAN TEORITIS

2.1. Controling

2.1.1. Pengertian Controling

Menurut Siagian (2010:112) Dalam Tambunan et al (2022) Fungsi controlling merupakan sebuah aspek penting dalam manajemen aparatur negara agar segala tugas, fungsi, dan program-program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengertian Controlling (Pengawasan) adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan

Menurut Iswandir (2017) Pengawasan dapat didefinisikan se-bagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.Ini berkenaan dengan cara- cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Selvianingrum (2023) Pengawasan merupakan salah kegiatan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menciptakan suasana kerja yang produktif. Disamping itu pula pengawasan adalahproses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki kedudukan dan peranan yang penting karena sebagai Aparatur Negara merupakan abdi negara dan abdi Masyarakat berperan

melayani masyarakat dalam bidang menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi controlling merupakan proses krusial dalam manajemen untuk memastikan pelaksanaan tugas dan program berjalan sesuai rencana, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas dan efisiensi organisasi atau pemerintah dapat tercapai.

2.1.2. Tipe-Tipe Controling

1. Menurut Iswandir (2017)Pengawasan pendahuluan (feedforward control), dirancanguntuk mengantisipasi masalahmasalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengaini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil Tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan lebih efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control), pengawasan ini sering disebut “Ya-Tidak”, screening control atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek

tertentu dengan dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Pengawasan umpan balik (feedback control), dikenal juga sebagai past-action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

tipe-tipe pengawasan menurut Issakh dan Wiryawan (2015:534):

A. Pengawasan pendahuluan (preliminary control) Pengawasan pendahuluan dirancang mengantisipasi masalah atau penyimpangan untuk yang berasal dari standar suatu sasaran atau tujuan dan memungkinkan koreksi perbaikan sebelum tahap kegiatan diselesaikan.
B. Pengawasan Bersama (cocurrent Control) Pengawasan bersama dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, dalam pengawasain ini evaluasi dapat dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan sedang berlangsung.
C. Pengawasan umpan balik (Feed Back Control)

   Said Hamzali.dkk (2022,hal 193)Pengawasan umpan balik adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Dalam artian pengawasan dilakukan setelah kegiatan diselesaikan dan jika ada penyimpangan-penyimpangan yang

terjadi pada pelaksanaan akan diperbaiki pada penerapan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Tipe Pengawasan menurut fokus Pengawasan terbagi menjadi tiga, yaitu:

a) Pengawasan awal/pendahuluan

Feedforward control atau preliminary control memastikan bahwa organisasi telah siap mengantisipasi suatu masalah, bahkan sebelum masalah itu terjadi.

b) Pengawasan bersamaan (concurrent)

Merupakan pengawasan yang dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Manajer melakukan fungsi pengarahan kepada pekerja bawahannya.

c) Pengawasan umpan balik

Dian Ari Nugroho (2017, 63).Merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mengkoreksi masalah yang terjadi, dan menggunakannya untuk bahan perbaikan kedepan

Berdasarkan yang di atas bahwa dapat di simpulkan ketiga tipe pengawasan ini saling melengkapi dan penting dalam proses manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Penggunaan yang tepat dari masing-masing tipe pengawasan akan membantu manajer dalam mengelola sumber daya dan mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam operasional organisasi.

2.1.3. Prinsip-Prinsip pengawasan (*Controling*)

Menurut Ananda muhamad tri utama dkk, (2022) adalah Prinsip pengawasan harus diperhatikan untuk menghasilkan proses pengawasan yang efektif. Prinsip utama dalam pengawasan adalah rencana tertentu dan pemberian instruksi atau wewenang kepada bawahan secara jelas. Perencanaan menjadi petunjuk keberhasilan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Fungsi pengawasan memuat prinsip berikut:

a. Merefleksikan sifat dan kebutuhan kegiatan yang diawasi.

b. Dapat segera melaporkan penyimpangan.

c. Bersifat fleksibel.

d. Merefleksikan pola organisasi.

e. Bersifat ekonomis.

f. Dapat dimengerti.

Prinsip pengawasan ini merupakan yang tertinggi dari setiap prinsip yang disebutkan. Bahkan jika pun prinsip-prinsip di atas itu hanya satu saja, yaitu prinsip pengawasan, telah cukuplah sudah. Bahwa setiap kalimat yang diucapkan harus dengan ikhlas, baik, bersih, hati-hati, dan seimbang. Karena sebagai seorang makhluk dan hamba kita akan terus diawasi, semua yang dilakukan termasuk dari perkataan akan terhitung dan diawasi. Maka jika seseorang cuup cerdas melihat kondisi ini ia tak akan melakukan hal yang dapat merugikannya.(Deni Rahman, 2021, 49).

Prinsip utama dalam pengawasan pemerintahan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas mencakup kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas

keputusan dan tindakan yang diambilnya, serta untuk melaporkan hasil dan proses pelaksanaan kepada publik. Pengawasan yang baik harus mampu memastikan bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik tetapi juga transparan dalam pelaporan dan komunikasinya. Hal ini memerlukan mekanisme pengawasan yang terstruktur, mulai dari audit internal hingga laporan publik yang jelas dan terbuka, Akuntabilitas juga melibatkan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan dan menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan kebijakan (Bovens et al., 2008) balam (Stiawan dan Johannes, 68)

Berdasarkan yang di atas bahwa dapat di simpulkan prinsip-prinsip pengawasan yang efektif dan akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi yang ada.

2.1.4. Fungsi pengawasan (Controling**)**

Fungsi pengawasan (*controlling*) adalah sebuah aspek penting dalam manajemen aparatur negara agar segala tugas, fungsi, dan program-program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengertian Controlling (Pengawasan) adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Tambunan et dkk., 2022)

Fungsi pengawasan adalah fungsi manajemen yang terakhir dimana fungsi ini merupakan alat untuk mengukur dan menilai hasil rencana yang dicanangkan pada

fungsi pertama, memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal- hal yang belum sempurna (Fahrner, 2016).

Mengemuka-kan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastiakan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaiamana mestinya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai (Sule dan Saefullah, 2011,79)

Dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya berfokus pada pengendalian, tetapi juga pada perbaikan berkelanjutan dan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2.1.5. Tujuan pengawasan (*Conroling*)

Tujuan Pengawasan adalah mencapai penyelenggaraan pemerintahan desa yang memenuhi kriteria good governance diperlukan adanya pengawasan, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal sangat dibutuhkan terlebih apabila rentang kendali pimpinan sudah sedemikian luas. Good Governance mensyaratkan perlu adanya pengawasan internal dan eksternal. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan harus dilaksanakan secara terus-menerus serta konsisten sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan jabatan maupun kewenangan baik ditingkat Pusat maupun pemerintah desa, sebab hubungan pelaksanaan pembangunan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pengawasan diharapkan memiliki fungsi bagi masyarakat

serta tidak melakukan penyelewengan pelaksanaan tugas dan harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya bahwa fungsi pengawasan menetapkan tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana mencapainya. Oleh karena itu, fungsi pengawasan tidak terlepas dari fungsi manajemen khususnya perencanaan. Dengan demikian dalam pelaksanaan pengawasan juga dilakukan perencanaan sebab yang ingin diawasi sesuai tidak dengan program yang telah di rencanakan (Zainudin & Riadi dkk, 2023)

Tujuan pengawasan adalah untuk mengontrol kegiatan yang telah direncana-kan di tahap planning, apakah sesuai dengan koridor atau tidak. Dengan adanya tujuan dalam pengawasan, maka secara jelas bahwa pengawasan memiliki orientasi yang melekat pada program. (fajlurahman jurdi,2023, 127).

tujuan pengawasan adalah Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu ber-jalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemah-an, atau kegagalan ke arah perbaikan (Syafrudin 2015, 79)

Dapat di simpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengontrol kegiatan yang telah direncanakan, memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi kesulitan dan kelemahan dalam proses kerja. Pengawasan yang efektif akan membantu menemukan solusi

untuk perbaikan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan efisien dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keseluruhan, pengawasan memiliki orientasi yang jelas terhadap program dan bertujuan untuk memastikan pencapaian hasil yang diinginkan.

2.2. Pajak Bumi Bangunan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, pengusaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Setelah hampir satu dasawarsa berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, dengan makin meningkatnya kesejahteraan

masyarakat dan meningkatnya jumlah Objek Pajak serta untuk menyelaraskan pengenaan pajak dengan amanat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, dirasakan sudah masanya untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang ini adalah sebagai berikut : a. Menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak; b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

2.3. Tugas pokok dan Fungsi Lurah

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018, Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah. Lurah memiliki tanggung jawab untuk membantu camat dalam melaksanakan beberapa Urusan Pemerintahan yang berada dibawah kewenangan Camat. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan merupakan wilayah kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan, sebagai bagian terkecil dari pemerintahan, memiliki wewenang yang lebih terbatas untuk mengelola wilayahnya.

Tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut:

a. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan

dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan.

b. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertangggungjawab kepada Camat

Fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut:

a) Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
b) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
d) Penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
e) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f) Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
g) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
h) Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
i) Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
k) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

Dapat disimpulkan bahwa Kelurahan memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Lurah, sebagai pemimpin Kelurahan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembina dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penlitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metodependektan deskriptif dengan analisis data kualittatif yang merupakan prosodurnya pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan fenomena pada objek saat sekarang berdasarkan fakta fakta yang tampak sebagimana adanya. mengenai Efektifitas Fungsi Controling Lurah dalam Optilamisasi Pembayran Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kelurahan Galang Kota Kab.Deli Serdang Kec. Galang Kota Fungsi dan berhadapan langsung dengan informan dan narasumber.

Analisis kualitatif menurut Craswell Dalam (Fraditha, 2024) penelitian kualitatif merupakan metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang olah sejumlah individua tau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan – pertanyaan dan prosedur - prosedur mengumpulkan data yang spepisik dari para partisipan menganalisis data secara induktif dari mulai tema -tema umum dan menafsirkan makna data sehingga dapat ditemukan gambaran gambaran bagaimana Fungsi Controling Lurah dalam Optilamisasi Pembayran Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kelurahan Galang Kota Kab.Deli Serdang Kec. Galang Kota.

3.2. Kerangka Konsep

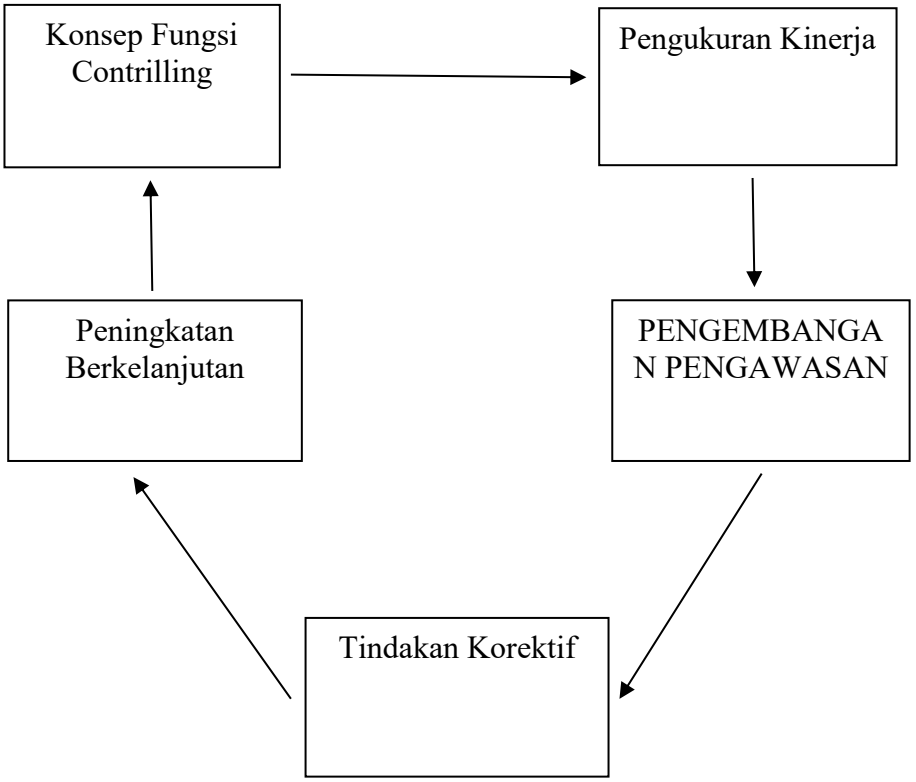

3.3. Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaaan kelompok atau individu. Berkaitan dengan hal itu maka dalam penelitian ini digunakan kosep -kosep sebagai berikut pihak yang lebih atas kepada pihak yang berada dibawahnya.

- Fungsi controling .

bahwa fungsi controlling merupakan proses krusial dalam manajemen untuk memastikan pelaksanaan tugas dan program berjalan sesuai rencana, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas dan efisiensi organisasi atau pemerintah dapat tercapai.

- Tugas pokok dan Fungsi Lurah

Kelurahan memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Lurah, sebagai pemimpin Kelurahan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembina dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.

- Pajak Bumi Bangunan

Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menempatkan perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan semangat gotong royong dalam pembiayaan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang menjadi dasar pemungutan pajak atas tanah dan bangunan. Pembayaran PBB merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan meningkatkan kesejahteraan, perlu dilakukan penyempurnaan undang-undang ini dengan tetap mengedepankan

kepastian hukum dan keadilan, serta mendukung kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi merupakan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut. Berikut berapa kategorisasi didalam penelitian ini iyalah sebagai berikut.

a) Adanya Pengawasan pendahuluan (preliminary control) Pengawasan pendahuluan dirancang mengantisipasi masalah atau penyimpangan untuk yang berasal dari standar suatu sasaran atau tujuan dan memungkinkan koreksi perbaikan sebelum tahap kegiatan diselesaikan.
b) Adanya Pengawasan Bersama (cocurrent Control) Pengawasan bersama dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, dalam pengawasain ini evaluasi dapat dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan sedang berlangsung.
c) Adanya Pengawasan umpan balik (Feed Back Control) Pengawasan umpan balik adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Dalam artian pengawasan dilakukan setelah kegiatan diselesaikan dan jika ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan akan diperbaiki pada penerapan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. (Said Hamzali.dkk 2022,hal 193).

3.5. Narasumber

Untuk melengkapi data yang akan dianalisis secara kualitatif maka dalam penelitian ini penulis mengambil narasumber untuk memberikan pandangan terhadap Efektifitas Fungsi Controling Lurah dalam Optilamisasi Pembayran Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kelurahan Galang Kota Kab.Deli Serdang Kec. Galang Kota.

a. Lurah Kelurahan Galang Kota

Nama : Merry Luciana V. Pasaribu, S.Stp

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Gg. Damai. Lingkungan V

b. Sekretaris Lurah Galang Kota

Nama : Yusmaini, S.Sos

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln. Tanah Abang.

c. Kepala Lingkungan V kelurahan Galang Kota

Nama : Johan Tanjung

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Alamat : Jln. Impres, Lingkungan V

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan holistik mengenai fenomena yang sedang diteliti. Teknik-teknik ini digunakan untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pemahaman dari para partisipan. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang

umum digunakan dalam penelitian :

- Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti mewawancarai partisipan secara langsung untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka mengenai topik yang diteliti.
- Observasi Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati langsung peristiwa atau aktivitas yang sedang terjadi.
- Dokumentasi Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa berupa laporan, arsip, rekaman, kebijakan, atau materi tertulis lainnya yang memberikan informasi terkait. Teknik ini menggunakan gambar, foto, atau video sebagai bagian dari pengumpulan data.
- Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder melibatkan penggunaan data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh peneliti lain atau organisasi sebelumnya. Teknik ini berguna untuk mendapatkan gambaran umum atau konteks dari fenomena yang diteliti.
- Penggunaan Media Sosial dan Forum Online 25 Pengumpulan data ini dilakukan melalui analisis konten media sosial atau forum online. Teknik ini berguna untuk mendapatkan pemahaman tentang opini dan perilaku masyarakat yang berinteraksi secara digital.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data vang dikemukakan oleh (Moleong, 2014), adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang

penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dan dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian, Adapun teknik analisa data yang peneliti ambil yaitu:

- Pengumpulan Data Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (baik itu foto maupun data) akan ditulis di catatan lapangan. Untuk memperoleh catatan ini, maka diperlukan bagi peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dan informan.
- Reduksi Data Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, mengelompokkan guna mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Pada penelitian ini redukasi data yang dilakukan dengan membuat ringkasan terhadap hal yang diteliti berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh pihak terkait.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini di Kelurahan Galang Kota pada tangal 17 maret sampai Agustus 2025, dengan judul Efektivitas fungsi *controlling* Lurah dalam optimalisasi pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) dikelurahan galang kota.

3.9. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

Kelurahan Galang Kota merupakan satu-satunya kelurahan di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini memiliki

luas sekitar 166,62 hektare dengan jumlah penduduk kurang lebih 10.284 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya cukup tinggi. Secara geografis, Kelurahan Galang Kota berada di dataran rendah dengan kontur tanah datar dan iklim tropis lembap, dengan suhu berkisar antara 22,7°C hingga 33°C serta curah hujan tahunan mencapai 2.294–2.452 mm.

Penduduknya terdiri dari beragam etnis, di antaranya Jawa, Batak (Simalungun, Karo, Toba, Mandailing), dan Melayu, dengan mayoritas beragama Islam, disusul Kristen, Buddha, dan Hindu. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pedagang, karyawan, serta buruh harian lepas. Kelurahan ini juga ditetapkan sebagai Kampung KB (Keluarga Berencana) oleh Dinas P2KB dan P3A Kabupaten Deli Serdang pada Januari 2024 sebagai model inovasi pembangunan keluarga. Dukungan program Kampung KB di wilayah ini meliputi penyediaan sarana seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Remaja (BKR), Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Dengan luas wilayah yang relatif kecil namun jumlah penduduk yang padat, Kelurahan Galang Kota menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan Galang.

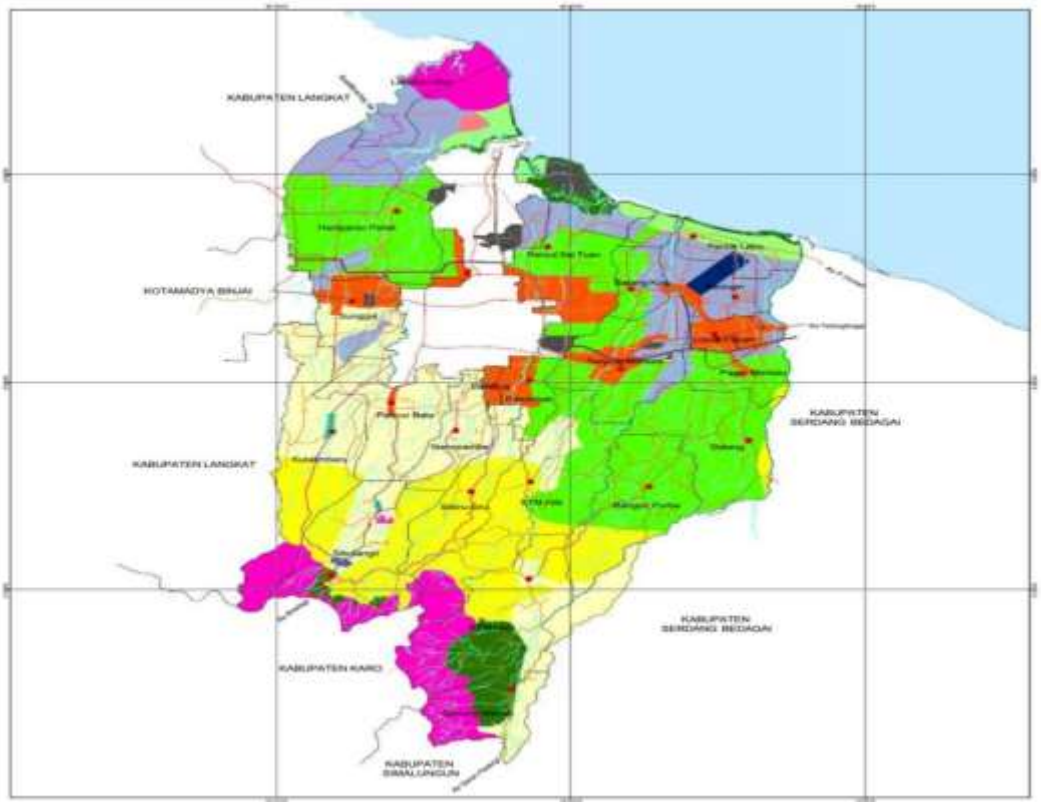

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Deli Serdang

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Kelurahan Galang Kota.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data yang sudah disebutkan pada bab III. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendukung pada penelitian ini. Data tersebut berupa pernyataan dari informan mengenai fungsi controlling lurah dalam optimalisasi pembayaran PBB di kelurahan galang kota.

Adapun beberapa informan tersebut terdiri dari Lurah Kelurahan Galang Kota Merry Luciana V. Pasaribu, S.Stp, Sekretaris Lurah Ibu Yusmaini, S.Sos , Dan Kepala Lingkungan V kelurahan galang kota Bapak Johan Tanjung. Berikut Adalah hasil dari wawancara tersebut yang telah berlangsung dikantor lurah kelurahan galang kota, Kabupaten Deli Serdang, yang menjadi landasan dari permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara tersebut, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan dengan kategorisasi yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya.

4.1.1. Deskripsi Hasil Wawancara

1. Adanya pengawasan pendahuluan

   Pengawasan pendahuluan dirancang mengantisipasi masalah atau penyimpangan untuk yang berasal dari standar suatu sasaran atau tujuan dan

memungkinkan koreksi perbaikan sebelum tahap kegiatan diselesaikan. Ketiga narasumber narasumber tersebut memberikan pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang ada pada kelurahan galang kota.

Narasumber 1, Ibu Yusmaini, S.Sos pada tanggal 1 Agustus 2025 10:21 WIB, menyampaikan langkah pertama yaitu memastikan bahwa data wajib pajak diwilayah kelurahan telah lengkap dan akurat. Kemudian lurah memberikan intruksi kepada sekretaris dan staf kelurahan untuk berkoordinasi dengan petugas PBB tingkat kelurahan serta kepala lingkungan yang ada di kelurahan galang kota.

Pengumpulan data awal dilakukan melalui penerimaan dan pemeriksaan SPPT, pencocokan dengan data kependudukan, serta pendataan lapangan oleh petugas atau kader PBB. Data ini digunakan untuk menyusun daftar wajib pajak aktif dan pasif sebagai dasar pengawasan.

Lurah juga melakukan pemetaan potensi PBB dengan mengidentifikasi wilayah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, objek pajak baru, serta objek pajak yang belum terdata. Pemetaan ini membantu dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak.

Sebagai acuan kerja, terdapat SOP yang mengatur seluruh tahapan pengawasan PBB, mulai dari distribusi SPPT, pemutakhiran data, pemantauan pembayaran, hingga pelaporan. SOP ini memastikan proses berjalan sesuai ketentuan dan dapat dievaluasi secara berkala.

Selanjutnya narasumber 2, Bapak Johan Tanjung sebagai kepala lingkungan memberikan pernyataan pada tanggal 1 Agustus 2025 pada Jam

16.30 WIB bahwa kelurahan selalu mengadakan rapat bersama seluruh kepala lingkungan untuk menyampaikan target dan batas waktu pembayaran PBB. Pengumpulan data awal saya lakukan dengan turun langsung ke lapangan, dibantu ketua RT atau tokoh masyarakat setempat. Kami mencocokkan data SPPT dari kelurahan dengan kondisi riil di lapangan, karena terkadang ada perbedaan antara data dan kenyataan, misalnya warga yang sudah pindah atau tanah yang sudah dijual.

Saya juga melakukan pemetaan potensi PBB secara sederhana, seperti mencatat rumah-rumah besar atau lahan kosong yang berpotensi dikenakan pajak lebih tinggi. Data ini saya sampaikan ke kelurahan sebagai bahan masukan. Ini penting agar tidak ada potensi pajak yang terlewatkan.

Terkait SOP, di tingkat lingkungan kami memang tidak memegang SOP tertulis, tapi kami mengikuti arahan dari kelurahan dan Bapenda. Biasanya ada jadwal dan tata cara yang kami ikuti dalam pendistribusian SPPT, pengumpulan informasi, hingga pelaporan hasil pantauan ke kelurahan.

Narasumber 3, Ibu Merry Luciana V. Pasaribu, S.Stp sebagai lurah memberikan pernyataan pada tanggal 16 Agustus 2025 pada jam 10.01 WIB bahwa langkah awal yang kami lakukan dalam menjalankan fungsi controlling pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah memastikan data wajib pajak di wilayah Kelurahan Galang Kota benar-benar akurat dan mutakhir.

Hal ini dimulai dengan melakukan koordinasi bersama perangkat kelurahan, kepala lingkungan untuk mendata dan memverifikasi jumlah objek

pajak dan subjek pajak. Dengan begitu, kita dapat mengetahui siapa saja wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajiban, maupun yang masih menunggak. Kemudian Ibu Lurah memberikan pernyataan selanjutnya yaitu Proses pengambilan data awal wajib pajak dilakukan melalui pendataan lapangan secara langsung, mengacu pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang kami terima dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Data tersebut kemudian kami cocokan kembali dengan kondisi nyata di lapangan, misalnya apabila ada perubahan status tanah, bangunan baru, atau peralihan hak kepemilikan. Dari hasil verifikasi tersebut, kami menyusun daftar prioritas wajib pajak yang akan menjadi fokus dalam kegiatan pengawasan.

Terkait pemetaan potensi PBB, tentu saja kami melakukannya. Pemetaan ini sangat penting agar kami mengetahui potensi riil penerimaan PBB di Kelurahan Galang Kota. Kami melakukan pemetaan berdasarkan wilayah lingkungan, luas tanah, jenis bangunan, serta klasifikasi ekonomi masyarakat. Dengan pemetaan tersebut, kami dapat mengidentifikasi lingkungan mana yang berpotensi tinggi dalam penerimaan PBB, sekaligus lingkungan yang masih rendah tingkat kepatuhannya sehingga memerlukan pendekatan lebih intensif.

Sedangkan mengenai SOP, memang sudah ada pedoman dan arahan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Bapenda yang menjadi acuan kami dalam pengawasan PBB. Di tingkat kelurahan, SOP ini kami terapkan melalui tahapan pendataan, sosialisasi, pemantauan, hingga evaluasi.

2. Pengwasan Bersama

Pengawasan bersama dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, dalam pengawasain ini evaluasi dapat dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan sedang berlangsung.

Narasumber 1, Yusmaini, S.Sos pada tanggal 1 agustus 10.21 WIB Menyatakan Dalam pengawasan PBB, sekretaris lurah berperan pada aspek administrasi dan pencatatan. Kami memastikan seluruh data wajib pajak yang masuk dari kepling sudah terhimpun dengan rapi dan sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). Kami juga menyiapkan laporan perkembangan pembayaran yang nantinya dilaporkan lurah ke kecamatan maupun Bapenda.

Selain itu, kami ikut dalam forum koordinasi yang rutin diadakan, khususnya untuk membahas progres dan kendala teknis. Jika ada warga yang menunggak, tugas kami adalah menyiapkan surat pemberitahuan resmi atau tindak lanjut administrasi sesuai arahan lurah. Jadi, kalau kepling lebih fokus di lapangan, kami mendukung dari sisi administrasi agar proses pengawasan berjalan tertib dan terkontrol.

Narasumber 2, Bapak Johan Tanjung sebagai kepala lingkungan V memberikan pernyataan pada tanggal 1 Agustus 2025 16:30 WIB yaitu Dalam pelaksanaan pengawasan pembayaran PBB, kami sebagai kepala lingkungan biasanya terlibat langsung bersama lurah, dan tokoh masyarakat. Peran kami lebih banyak di lapangan, karena kami yang paling dekat dengan warga dan tahu persis kondisi mereka.

Tugas utama kami adalah membagikan SPPT ke rumah-rumah, mengingatkan warga agar jangan sampai lewat jatuh tempo, sekaligus mencatat siapa saja yang sudah bayar dan siapa yang belum. Kami juga sering jadi penghubung kalau ada warga yang ingin bertanya atau mengalami kendala dalam proses pembayaran.

Untuk koordinasi, biasanya lurah mengadakan pertemuan dengan kami dan tokoh masyarakat. Dari pertemuan itu, kami bisa menyampaikan laporan kondisi warga di lingkungan, termasuk kendala yang mereka hadapi. Forum ini penting supaya ada jalan keluar bersama, misalnya memperbanyak sosialisasi atau mendampingi warga yang belum paham cara pembayaran.

Kalau ada warga yang menunggak, biasanya saya datangi langsung secara personal. Pendekatan kami tidak dengan cara menekan, tetapi lebih ke mengingatkan secara baik-baik. Kalau memang ada kesulitan ekonomi, biasanya saya sampaikan ke kelurahan untuk dicarikan solusi bersama. Intinya, kami berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan warga, tapi juga tetap memastikan kewajiban mereka dipenuhi.

Narasumber 3, Ibu Merry Luciana V. Pasaribu, S.Stp sebagai lurah Kelurahan Galang Kota memberikan pernyataan pada tanggal 16 agustus 2025 pada jam 10.01 yaitu Dalam pelaksanaan pengawasan bersama terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pihak-pihak yang kami libatkan tidak hanya perangkat kelurahan saja, tetapi juga kepala lingkungan, tokoh masyarakat, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai instansi teknis. Keterlibatan berbagai unsur ini penting karena pengawasan PBB

memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam lanjutannya Ibu lurah memberikan penyataan Peran kepala lingkungan (kepling) sangat sentral dalam membantu pengawasan. Mereka menjadi ujung tombak di lapangan karena paling dekat dengan warga dan memahami kondisi sosial masyarakatnya. Kepling berperan dalam mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), memberikan sosialisasi, mengingatkan warga terkait batas waktu pembayaran, sekaligus melaporkan kepada kelurahan apabila ada wajib pajak yang mengalami kendala.

terkait forum koordinasi, kami memang rutin melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, kepala lingkungan, dan perangkat kelurahan. Forum ini berfungsi untuk membahas capaian PBB, kendala yang dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh bersama. Dengan adanya forum koordinasi ini, kami bisa membangun komunikasi dua arah, baik dalam menyampaikan kebijakan pemerintah maupun menerima masukan langsung dari masyarakat.

Untuk penanganan warga yang menunggak, langkah awal yang kami lakukan adalah pendekatan persuasif. Biasanya kepling dan perangkat lingkungan melakukan komunikasi langsung dengan warga yang bersangkutan, memberikan penjelasan mengenai kewajiban serta manfaat PBB bagi pembangunan daerah.

3. Pengawasan Umpan Balik

Pengawasan umpan balik adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Dalam

artian pengawasan dilakukan setelah kegiatan diselesaikan dan jika ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan akan diperbaiki pada penerapan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. (Said Hamzali.dkk 2022,hal 193).

Narasumber 1, Yusmaini, S.Sos memberikan pernyataan pada tanggal 1 agustus 2025 10:21 Wib yaitu Sebagai sekretaris lurah, evaluasi capaian PBB kami lakukan melalui pengolahan data yang masuk dari setiap lingkungan. Kami tidak hanya mencatat berapa persen target tercapai, tetapi juga membuat rekapitulasi jumlah wajib pajak, nilai tunggakan, dan pola pembayaran tiap tahun. Indikator yang kami gunakan biasanya berupa persentase realisasi dibandingkan target, tren penurunan atau kenaikan tunggakan, serta ketepatan laporan dari lingkungan. Data yang sudah tersusun ini kemudian menjadi bahan analisis untuk strategi tahun berikutnya, misalnya dengan menyoroti wilayah yang tingkat kepatuhannya rendah. Hasil evaluasi tersebut juga kami sampaikan kembali dalam rapat bersama perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat, sehingga ada transparansi sekaligus komitmen bersama dalam meningkatkan kepatuhan PBB di tahun berikutnya.

Narasumber 2, Bapak Johan Tanjung memberikan pernyataan pada tanggal 1 Agustus 2025 16:30 WIB yaitu Bagi kami di lingkungan, evaluasi PBB lebih fokus pada siapa saja warga yang sudah patuh dan siapa yang masih menunggak. Indikatornya sederhana, kalau jumlah penunggak semakin sedikit berarti pengawasan berhasil. Data itu langsung kami serahkan ke

kelurahan, sementara kepada warga biasanya kami sampaikan secara singkat dalam pertemuan supaya mereka tahu kondisi sebenarnya di lingkungan.

Narasumber 3, Ibu Merry Luciana V. Pasaribu, S.stp memberikan pernyataan pada tanggal 16 Agustus 2025 pada pukul 10.01 WIB yaitu Setelah periode pemungutan PBB selesai, evaluasi kami lakukan dengan cara membandingkan target penerimaan yang ditetapkan dengan realisasi pembayaran di lapangan. Kami juga melihat distribusi kepatuhan warga berdasarkan lingkungan, sehingga bisa diketahui mana yang sudah optimal dan mana yang masih rendah tingkat pembayarannya. Evaluasi ini tidak hanya melihat angka capaian, tetapi juga kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan.

Indikator keberhasilan yang kami gunakan antara lain tingkat persentase capaian target, ketepatan waktu pembayaran wajib pajak, dan seberapa sedikit tunggakan yang tersisa. Sementara itu, apabila masih banyak tunggakan, tingkat kepatuhan rendah, dan sosialisasi tidak efektif, hal itu menjadi indikator bahwa pengawasan sebelumnya belum berjalan maksimal.

Data hasil pembayaran PBB kemudian kami olah menjadi laporan tahunan yang berisi capaian target, daftar tunggakan, serta catatan lingkungan dengan potensi dan tantangan tertentu. Dari situ, kami bisa merencanakan strategi pengawasan tahun berikutnya, misalnya dengan memperkuat sosialisasi di lingkungan yang kepatuhannya rendah atau menambah pendekatan persuasif bagi wajib pajak yang menunggak.

Sebagai bentuk transparansi, hasil pengawasan ini juga kami sampaikan

kepada masyarakat melalui forum pertemuan kelurahan bersama kepling, tokoh masyarakat, dan RT/RW. Sosialisasi hasil capaian PBB ini bukan hanya sekadar laporan, tetapi juga sebagai bahan pembelajaran bersama agar masyarakat memahami bahwa kontribusi mereka melalui PBB sangat berpengaruh pada pembangunan wilayah. Dengan begitu, transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan sekaligus kepatuhan wajib pajak di tahun-tahun berikutnya.

4.2. Pembahasan

Menurut (Zainudin & Riadi dkk, 2023) Tujuan Pengawasan adalah mencapai penyelenggaraan pemerintahan desa yang memenuhi kriteria good governance diperlukan adanya pengawasan, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal sangat dibutuhkan terlebih apabila rentang kendali pimpinan sudah sedemikian luas.

1. Adanya Pengawasan Pendahuluan

   pengawasan pendahuluan sangat penting dalam pengomptimalisasian pembayaran pajak bumi bangunan di kelurahan galang kota. Hasil wawancara tersebut memberikan petunjuk Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat diketahui bahwa langkah awal dalam pelaksanaan pengawasan PBB dimulai dari pendataan dan verifikasi data wajib pajak. Narasumber 1 menegaskan bahwa kelengkapan dan keakuratan data wajib pajak menjadi syarat utama sebelum dilakukan pengawasan. Oleh karena itu, lurah melalui sekretaris dan staf kelurahan diberikan instruksi untuk berkoordinasi langsung dengan petugas PBB tingkat kelurahan serta kepala

lingkungan. Hal ini bertujuan agar data yang digunakan sebagai dasar pemungutan benar-benar valid.

Selanjutnya, narasumber 2 menekankan pentingnya rapat koordinasi secara rutin antara pihak kelurahan dengan seluruh kepala lingkungan. Rapat ini menjadi forum penyampaian target penerimaan PBB sekaligus penentuan batas waktu pembayaran yang harus disosialisasikan kembali kepada masyarakat di masing-masing lingkungan. Dengan adanya forum koordinasi tersebut, diharapkan terjadi keseragaman informasi dan peningkatan komitmen para perangkat lingkungan dalam membantu kelurahan melakukan pengawasan.

Lebih jauh, narasumber 3 sebagai lurah menegaskan bahwa proses controlling PBB dilakukan melalui tahapan pendataan lapangan dan verifikasi objek serta subjek pajak. Data awal bersumber dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang diterima dari Bapenda. Namun, data tersebut tidak serta-merta digunakan begitu saja, melainkan dicocokkan kembali dengan kondisi nyata di lapangan. Proses ini mencakup pengecekan adanya perubahan status tanah, pembangunan baru, maupun peralihan hak kepemilikan. Dari hasil verifikasi inilah kemudian disusun daftar prioritas wajib pajak yang menjadi fokus dalam pengawasan, khususnya bagi yang masih memiliki tunggakan.

Selain itu, dilakukan juga pemetaan potensi PBB berdasarkan wilayah lingkungan, luas tanah, jenis bangunan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Pemetaan ini berfungsi untuk mengidentifikasi lingkungan yang memiliki

potensi penerimaan tinggi sekaligus lingkungan dengan tingkat kepatuhan rendah, sehingga kelurahan dapat menentukan strategi pendekatan yang tepat.

Terkait aspek prosedural, narasumber menyebutkan bahwa pengawasan PBB di Kelurahan Galang Kota tetap mengacu pada SOP yang ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Deli Serdang. SOP tersebut mencakup tahapan pendataan, sosialisasi, pemantauan, hingga evaluasi akhir. Dengan adanya SOP, proses pengawasan menjadi lebih terarah dan memiliki standar yang jelas sebagai pedoman bagi seluruh perangkat kelurahan.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Iswandir, 2017) yang mengatakan bahwa Pengawasan pendahuluan (feedforward control), dirancanguntuk mengantisipasi masalahmasalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil Tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan lebih efektif hanya bila Lurah mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.

2. Pengawasan Bersama

Pengawasan Bersama (cocurrent Control) Pengawasan bersama dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, dalam pengawasain ini evaluasi dapat dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan sedang berlangsung

(Issakh dan Wiryawan (2015:534)). Pengawasan bersama dapat mempermudah melakukan evaluasi dikarenakan adanya koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Pengawasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Galang Kota dilaksanakan melalui kerja sama antara perangkat kelurahan, kepala lingkungan, tokoh masyarakat, dan instansi teknis terkait. Perangkat kelurahan menjalankan fungsi administratif dengan menghimpun data wajib pajak dari setiap lingkungan, menyusun laporan perkembangan pembayaran secara berkala, serta menyiapkan tindak lanjut berupa surat pemberitahuan resmi apabila ditemukan warga yang belum melaksanakan kewajibannya. Pada sisi lain, kepala lingkungan berperan langsung di lapangan karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Tugas yang dijalankan meliputi distribusi SPPT, memberikan pengingat kepada warga agar tidak melewati batas waktu pembayaran, mencatat perkembangan pembayaran, hingga melakukan pendekatan persuasif terhadap wajib pajak yang menunggak.

Lurah memiliki peran koordinatif dengan menghubungkan berbagai unsur yang terlibat, baik melalui forum koordinasi rutin maupun rapat khusus yang membahas capaian, kendala, serta strategi pengawasan yang lebih efektif di tahun berikutnya. Forum ini sekaligus menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah kelurahan dan masyarakat, sehingga kebijakan dapat tersampaikan dengan baik serta masukan dari masyarakat juga dapat ditampung. Dengan pola pengawasan yang mengintegrasikan aspek

administrasi, teknis lapangan, dan koordinasi kelembagaan, upaya pengawasan PBB di Kelurahan Galang Kota dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Iswandir, 2017) Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control), pengawasan ini sering disebut "Ya-Tidak", screening control atau "berhenti-terus", dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dengan dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan "double-check" yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil dari pengawasan bersama bahwa ketika pengawasan dilakukan dengan tepat yaitu efektif dan efisien akan dapat membantu pengoptimalisasian dalam pembayaran pbb dikelurahan galang yang saat ini masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Pajak Bumi Bangunan sehingga masih ada beberapa masyarakat menunggak dalam perihal pembayaran PBB.

3. Adanya Pengawasan Umpan Balik

Pengawasan umpan balik Merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mengkoreksi masalah yang terjadi, dan menggunakannya untuk bahan perbaikan kedepan (Dian Ari Nugroho, 2017,hal 63). Demikian dengan adanya pengawasan umpan balik dapat memberikan gambaran dan evaluasi

strategi untuk kedepannya yang akan dihadapi pihak kelurahan terkait masalah pembayaran PBB dikelurahan galang kota.

Dari hasil wawancara menunjukan Evaluasi capaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Galang Kota dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan peran masing-masing perangkat. Dari sisi administrasi, sekretaris lurah berperan dalam mengolah dan merekap data hasil pemungutan yang disampaikan oleh kepala lingkungan. Proses evaluasi tidak sekadar mencatat persentase capaian target, melainkan juga menguraikan jumlah wajib pajak, nilai tunggakan, serta tren kepatuhan dari tahun ke tahun. Indikator yang digunakan pada tingkat kelurahan mencakup persentase realisasi terhadap target, tren kenaikan atau penurunan tunggakan, serta ketepatan laporan dari lingkungan. Data yang sudah diolah ini menjadi acuan untuk menyusun strategi pengawasan tahun berikutnya, khususnya dengan menyoroti wilayah yang masih rendah tingkat kepatuhannya.

Sementara itu, pada tingkat lingkungan, evaluasi dilakukan dengan lebih sederhana dan praktis. Kepala lingkungan menekankan pada identifikasi siapa saja warga yang sudah melaksanakan kewajiban dan siapa yang masih menunggak. Keberhasilan pengawasan diukur dari semakin sedikitnya jumlah penunggak setiap periode. Data tersebut kemudian disampaikan ke kelurahan, sedangkan kepada warga informasi hasil capaian biasanya disampaikan secara ringkas dalam pertemuan lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan sekaligus untuk mendorong warga lain agar lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Pada tingkat kelurahan, lurah memegang peran koordinatif dengan melakukan evaluasi menyeluruh. Indikator yang digunakan tidak hanya berupa persentase capaian target, tetapi juga mencakup ketepatan waktu pembayaran, tingkat kepatuhan antarlingkungan, serta identifikasi kendala dalam proses pemungutan. Data hasil evaluasi kemudian disusun menjadi laporan tahunan yang memuat capaian target, daftar tunggakan, serta catatan lingkungan dengan potensi maupun kendala tertentu. Hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi dasar penyusunan strategi pengawasan tahun berikutnya—seperti penguatan sosialisasi dan pendekatan persuasif—tetapi juga disampaikan kembali kepada masyarakat dalam forum pertemuan resmi. Transparansi ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan publik sekaligus menjadi sarana pembelajaran bersama, sehingga masyarakat menyadari pentingnya peran PBB dalam mendukung pembangunan wilayah.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Iswandir, 2017) di mana pengukuran dilakukan setelah kegiatan selesai untuk menilai apakah hasilnya sesuai dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Pada praktiknya, kelurahan melakukan evaluasi dengan membandingkan realisasi pembayaran PBB dengan target yang ditentukan oleh pemerintah daerah, kemudian merekap data dari masing-masing kepala lingkungan menjadi laporan bulanan. Dari hasil tersebut, mereka dapat mengidentifikasi wilayah atau lingkungan yang capaian PBB-nya rendah atau mengalami kendala, serta menganalisis penyebabnya. Temuan ini digunakan untuk menentukan langkah perbaikan di masa mendatang, seperti meningkatkan sosialisasi di wilayah bermasalah atau

memberikan tugas khusus kepada kepala lingkungan terkait. Proses ini mencerminkan sifat historis dari *feedback control*, di mana hasil pengukuran dan evaluasi pada periode sebelumnya menjadi acuan dalam penyusunan strategi pengawasan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Dengan demikian, penerapan pengawasan berbasis *feedback control* ini tidak hanya membantu memastikan pencapaian target PBB secara optimal, tetapi juga menjadi sarana perbaikan berkelanjutan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Galang Kota.

BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas fungsi controlling lurah dalam optimalisasi pembayaran PBB kelurahan galang kota, maka dapat disimpul sebagai berikut :

1. pengawasan pendahuluan di Kelurahan Galang Kota dilakukan melalui koordinasi antara kelurahan dan kepala lingkungan untuk mengumpulkan data pembayaran PBB yang akurat dan tepat waktu, sehingga potensi masalah dapat diantisipasi lebih awal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *feedforward control* yang bersifat proaktif, yakni mendeteksi dan mencegah penyimpangan sebelum terjadi, sehingga proses pemungutan PBB dapat berjalan lebih optimal.
2. pengawasan bersama di Kelurahan Galang Kota dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi antara lurah, sekretaris lurah, dan kepala lingkungan. Mekanisme ini memungkinkan evaluasi dan penyesuaian strategi dilakukan secara langsung di lapangan, sehingga kepala lingkungan dapat menjadi ujung tombak dalam mengawasi dan mengedukasi masyarakat terkait PBB. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *concurrent control* yang menekankan pemantauan dan pengecekan selama kegiatan berlangsung untuk memastikan ketepatan pelaksanaan. Dengan pengawasan yang efektif dan efisien, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta mengurangi tunggakan

pembayaran PBB, meskipun saat ini masih terdapat sebagian warga yang belum patuh dalam melunasi kewajibannya.

3. pengawasan umpan balik di Kelurahan Galang Kota dilakukan dengan mengevaluasi hasil pembayaran PBB setelah kegiatan selesai, membandingkannya dengan target, serta mengidentifikasi penyebab kendala. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan strategi, seperti peningkatan sosialisasi dan penugasan khusus di wilayah bermasalah, sehingga mendukung pencapaian target PBB dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka saran pada penelitian ini Adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi terkait pentingnya membayar PBB tepat waktu, khususnya di wilayah yang tingkat kepatuhannya masih rendah, dengan memanfaatkan pertemuan warga, media sosial kelurahan, dan papan informasi.
2. Memperkuat koordinasi antara pihak kelurahan dan kepala lingkungan agar proses pengawasan dari tahap awal hingga akhir dapat berjalan efektif dan informasi yang dibutuhkan tersedia secara cepat dan akurat.
3. Mengoptimalkan pengawasan bersama (concurrent control) di lapangan dengan memanfaatkan forum diskusi rutin, sehingga kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan tanpa menunggu akhir periode.

4. Memanfaatkan hasil evaluasi (feedback control) sebagai acuan penyusunan strategi tahun berikutnya, termasuk penentuan wilayah prioritas dan metode pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan warga serta Mengembangkan sistem pencatatan berbasis digital untuk mempermudah rekapitulasi dan pemantauan pembayaran PBB secara real-time, sehingga proses pelaporan lebih cepat, akurat, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Hamzali.s.dkk (2022). *PENGANTAR MANAJEMAN TEORI DAN APLIKASI*. Sumatra Barat: CV.AZKA PUSTAKA.

Nugroho,A.D (2017). *PENGANTAR MANAJEMAN UNTUK ORGANISASI BISNI. PUBLIK ,DAN NIRLABA.* Malang : UB Press.

Rahman, D. (2021). PENGANTAR KOMUNIKASI ISLAM. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Stiawan, I.Johannes,A.W (2024). *PENGAWASAN PMERINTAHAN DALAM ULASAN TEORI DAN PRAKTEK.* Bandung: Media Printing.

Jurdi,F. (2023). *PENGANTAR HUKUM ADMINITRASI NEGARA.* Jakarta: Kencana.

Hernimawati. (2018). *MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN REKLAME*. Surabaya: CV.Jakad Publishing.

ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA. (2022). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title*. *9*, 356–363.

Fahrner, R. (2016). Ishak. *Lyrische Dramen Nach Orientalischen Quellen*, 161–230. https://doi.org/10.7788/boehlau.9783412217785.161

Iswandir. (2017). Kegiatan sedang dilaksanakan Kegiatan telah dilaksanakan Feedforward Control Concurrent Control Feedback Control. *Garuda*, *1*, 68–76.

Selvianingrum, R. (2023). *PENGAWASAN KEPALA BADAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN*. *V*, 251–256.

Siti Hajar, Khaidir Ali, A. S. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *1*(4), 150–155. https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i4.75

Tambunan, Y. S., Hutabarat, P. K., & Santika, W. A. (2022). Implementasi Fungsi Controlling Terhadap Semangat Kerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety*, *1*(1), 65–72.

Zainudin, A., & Riadi, M. (2023). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, *21*(2), 360–374. https://doi.org/10.51826/fokus.v21i2.814

LAMPIRAN

Lampiran I SK-1

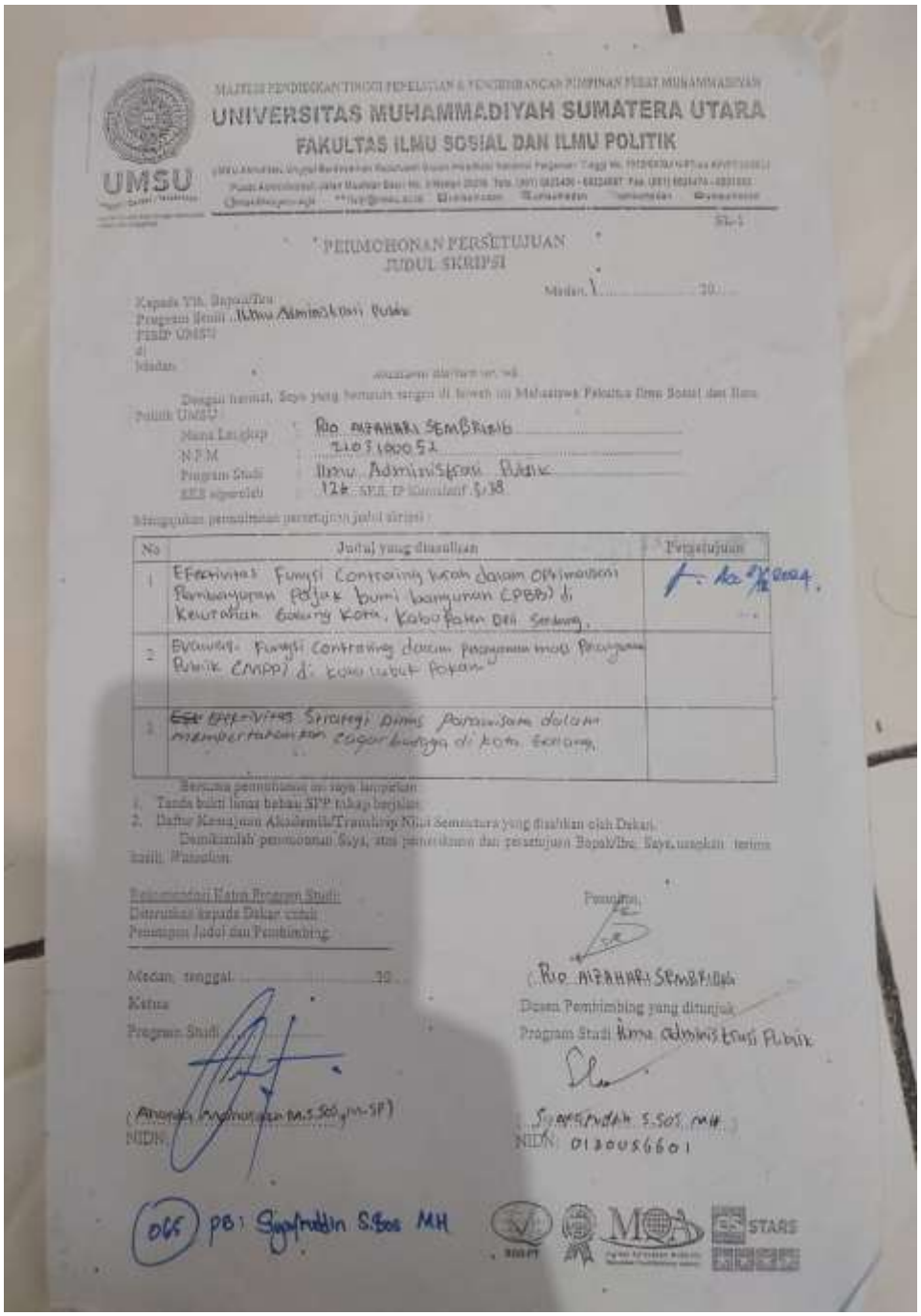

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

SK-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Medan, 1 ..... 20 ...

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Rio Alfahari Sembiring
N.P.M : 2103100052
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS sebelumnya : 124 SKS IP kumulatif 3,38

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas Fungsi Controlling kecamatan dalam Optimalisasi Pemanfaatan Pajak bumi bangunan (PBB) di Kecamatan Galang Kota. Kabupaten Deli Serdang.	
2	Evaluasi Fungsi Controlling dalam pengawasan mutu Pelayanan Publik (MPP) di kantor camat Pancur	
3	Efektivitas Strategi Dinas Pariwisata dalam memperkenalkan cagar budaya di kota Tanjung	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :
1. Tanda bukti lunas bahan SPP tahap berjalan
2. Daftar Kesepuluh Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penunjuk Judul dan Pembimbing

Medan, tanggal ..... 20 ...
Ketua
Program Studi

(Anwar Mahmud, M.S.Sos, M.SP)
NIDN :

Pemohon,

(Rio Alfahari Sembiring)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Syafruddin S.Sos, MH)
NIDN : 0120056601

065 pb: Syafruddin S.Sos MH

STARS

Lampiran II SK- 2

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2014

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 354/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **21 Desember 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa	: **RIO ALZAHARI SEMBIRING**
N P M	: 2103100052
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah)	: **EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLING LURAH DALAM OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN GALANG KOTA KABUPATEN DELI SERDANG**
Pembimbing	: **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 065.21.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 21 Juni 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tangal, 22 Djumadil Akhir 1446 H
23 Desember 2024 M
Dekan,

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
NIDN: 0030017402

Tembusan :
1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.

Lampiran III SK-3

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UMSU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan

Medan, 17 Februari 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RIO ARFANDI SEMBIRING
NPM : 2109100052
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa** (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 354/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 21 Februari 2025 dengan judul sebagai berikut :

EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING LURAH DALAM OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN GALANG KOTA, KECAMATAN GALANG, KABUPATEN DELI SERDANG.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK – 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Belum SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peserta Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukan ke dalam MAP berwarna **BIRU**;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disetujui oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam

Diketahui oleh Ketua Program Studi,

Menyetujui pembimbing,

Pemohon,

(ARYANDA MUHAMMAD ARIF, S.Sos, M.Si)
NIDN:

(SYAEFUDDIN, S.Sos, M.Si)
NIDN: 0130056601

(RIO ARFANDI SEMBIRING)

QS STARS

Lampiran IV SK-4

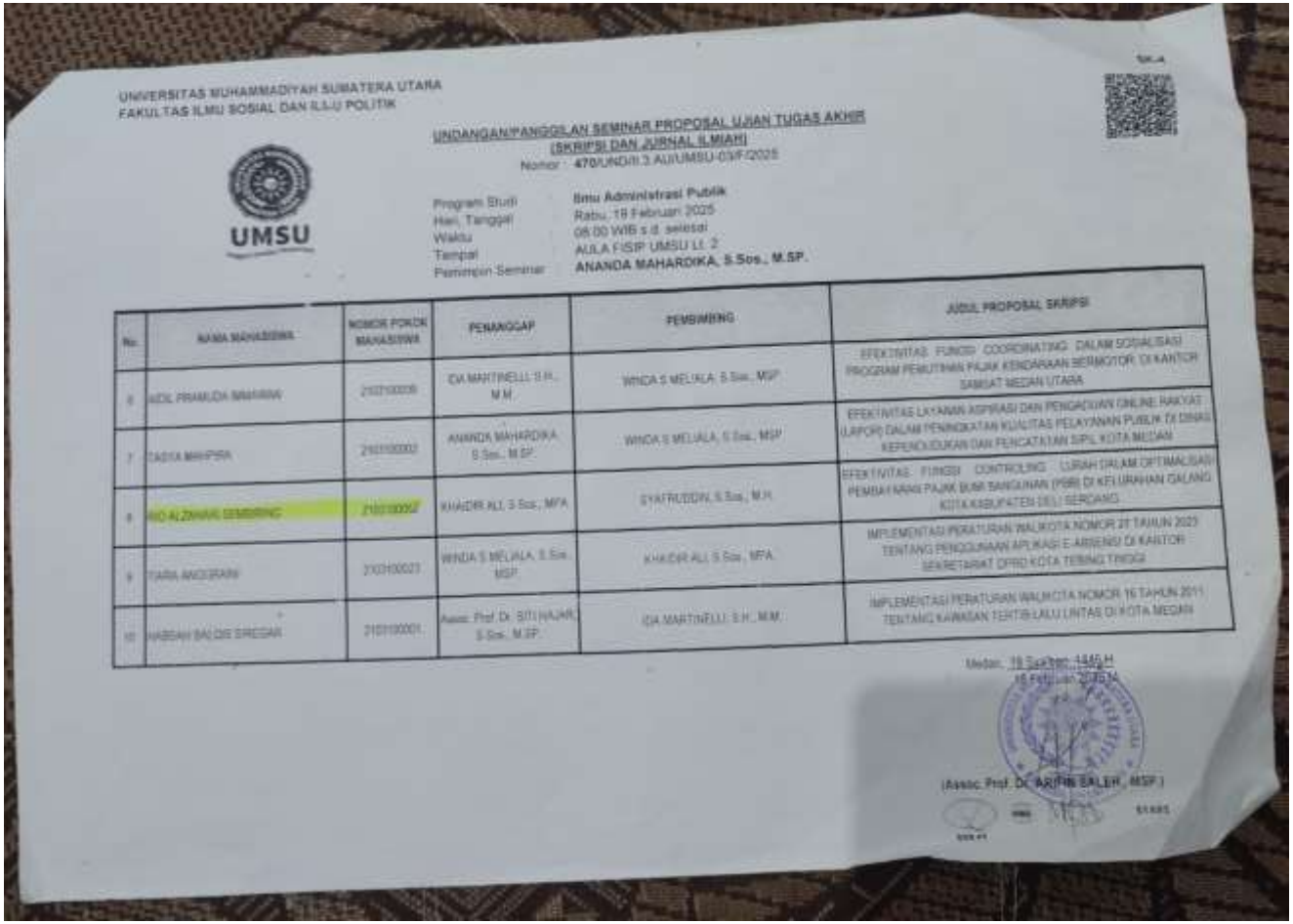

SK-4

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : **470/UNDIII.3 AU/UMSU-03/F/2025**

Program Studi	**Ilmu Administrasi Publik**
Hari, Tanggal	Rabu, 19 Februari 2025
Waktu	08.00 WIB s.d. selesai
Tempat	AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar	**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	AZIZ PRAMUDA WAHANA	2102100006	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP	EFEKTIVITAS FUNGSI COORDINATING DALAM SOSIALISASI PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA
7	TASYA MAHFIRA	2102100002	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP	EFEKTIVITAS LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN
8	RIO ALZIKRAN SEMBIRING	2102100002	KHADIR ALI, S.Sos., MPA	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLING LURAH DALAM OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN GALANG KOTA KABUPATEN DELI SERDANG
9	TARIA ANDIRANI	2102100023	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	KHADIR ALI, S.Sos., MPA.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI E-ARSIPKU DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD KOTA TEBING TINGGI
10	HABIBAH BALQIS SIREGAR	2102100001	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA MEDAN

Medan, 19 Sya'ban 1446 H
19 Februari 2025 M

(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.)
NIDN: 0103057501

Lampiran V Surat Izin Penelitian Dan Surat Balasan Izin Penelitian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

Nomor : 1205/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : - -
Hal : *Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 28 Muharram 1447 H
23 Juli 2025 M

Kepada Yth : **Lurah Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang**
di-
Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, atas nama :

Nama mahasiswa	: ***RIO ALZAHARI SEMBIRING***
N P M	: 2103100052
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: **EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLING LURAH DALAM OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN GALANG KOTA KABUPATEN DELI SERDANG**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan

Dr. ARIFIN SAGIH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0109017402

Cc : File

STARS

Lampiran VI Draft Wawancara

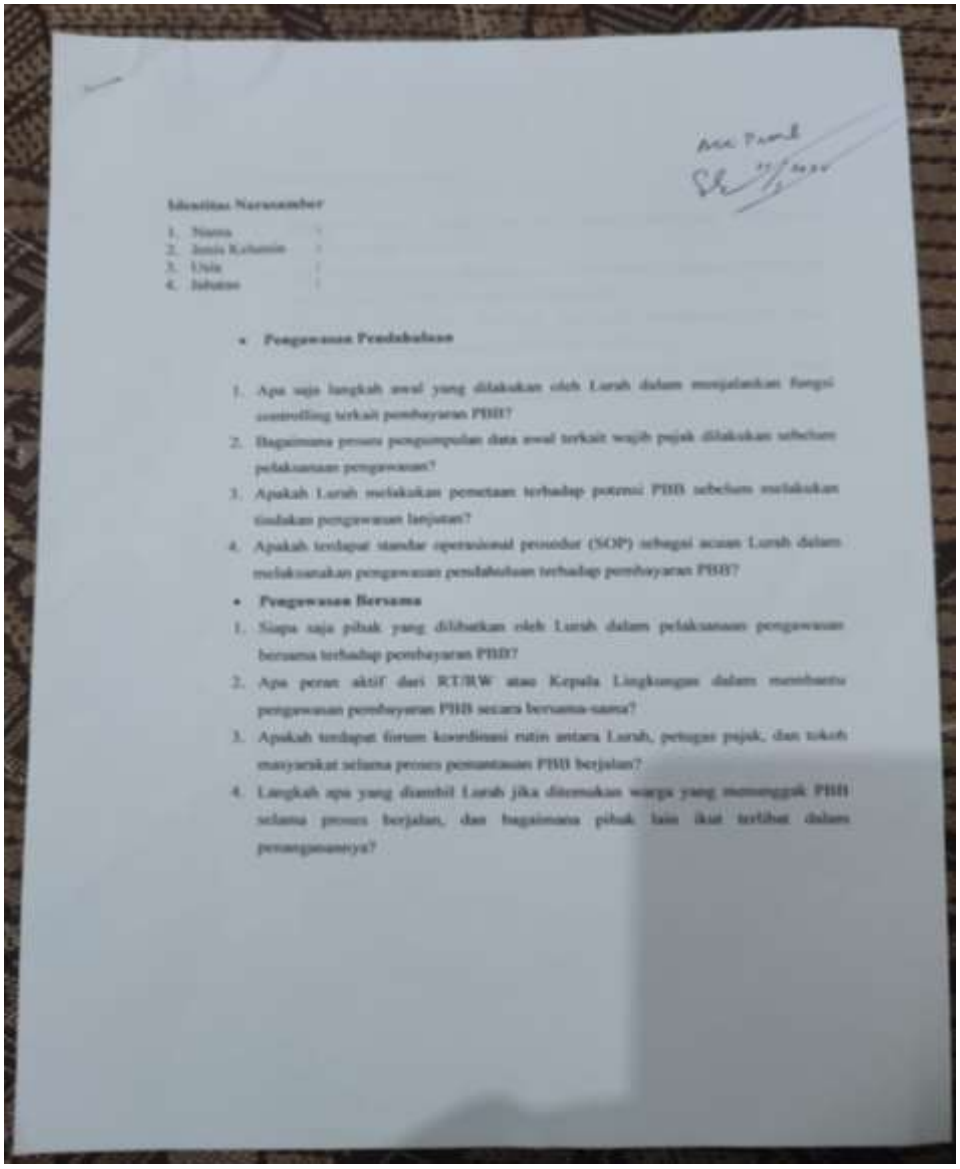

Identitas Narasumber

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Jabatan :

- **Pengawasan Pendahuluan**

1. Apa saja langkah awal yang dilakukan oleh Lurah dalam menjalankan fungsi controlling terkait pembayaran PBB?
2. Bagaimana proses pengumpulan data awal terkait wajib pajak dilakukan sebelum pelaksanaan pengawasan?
3. Apakah Lurah melakukan pemetaan terhadap potensi PBB sebelum melakukan tindakan pengawasan lanjutan?
4. Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan Lurah dalam melaksanakan pengawasan pendahuluan terhadap pembayaran PBB?

- **Pengawasan Bersama**

1. Siapa saja pihak yang dilibatkan oleh Lurah dalam pelaksanaan pengawasan bersama terhadap pembayaran PBB?
2. Apa peran aktif dari RT/RW atau Kepala Lingkungan dalam membantu pengawasan pembayaran PBB secara bersama-sama?
3. Apakah terdapat forum koordinasi rutin antara Lurah, petugas pajak, dan tokoh masyarakat selama proses pemantauan PBB berjalan?
4. Langkah apa yang diambil Lurah jika ditemukan warga yang menunggak PBB selama proses berjalan, dan bagaimana pihak lain ikut terlibat dalam penanganannya?

- **Pengawasan umpan balik**

1. Bagaimana Lurah mengevaluasi hasil capaian pembayaran PBB setelah periode pemungutan selesai?
2. Apa saja indikator yang digunakan oleh Lurah dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan strategi pengawasan sebelumnya?
3. Bagaimana cara Lurah mengolah data hasil pembayaran PBB untuk merencanakan strategi pengawasan di tahun berikutnya?
4. Apakah hasil pengawasan sebelumnya disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pembelajaran bersama?

Lampiran VIII Dokumentasi Dengan Kepala Lingkungan V Bapak Johan Tanjung

Lampiran IX Dokumentasi Dengan Staff Kelurahan

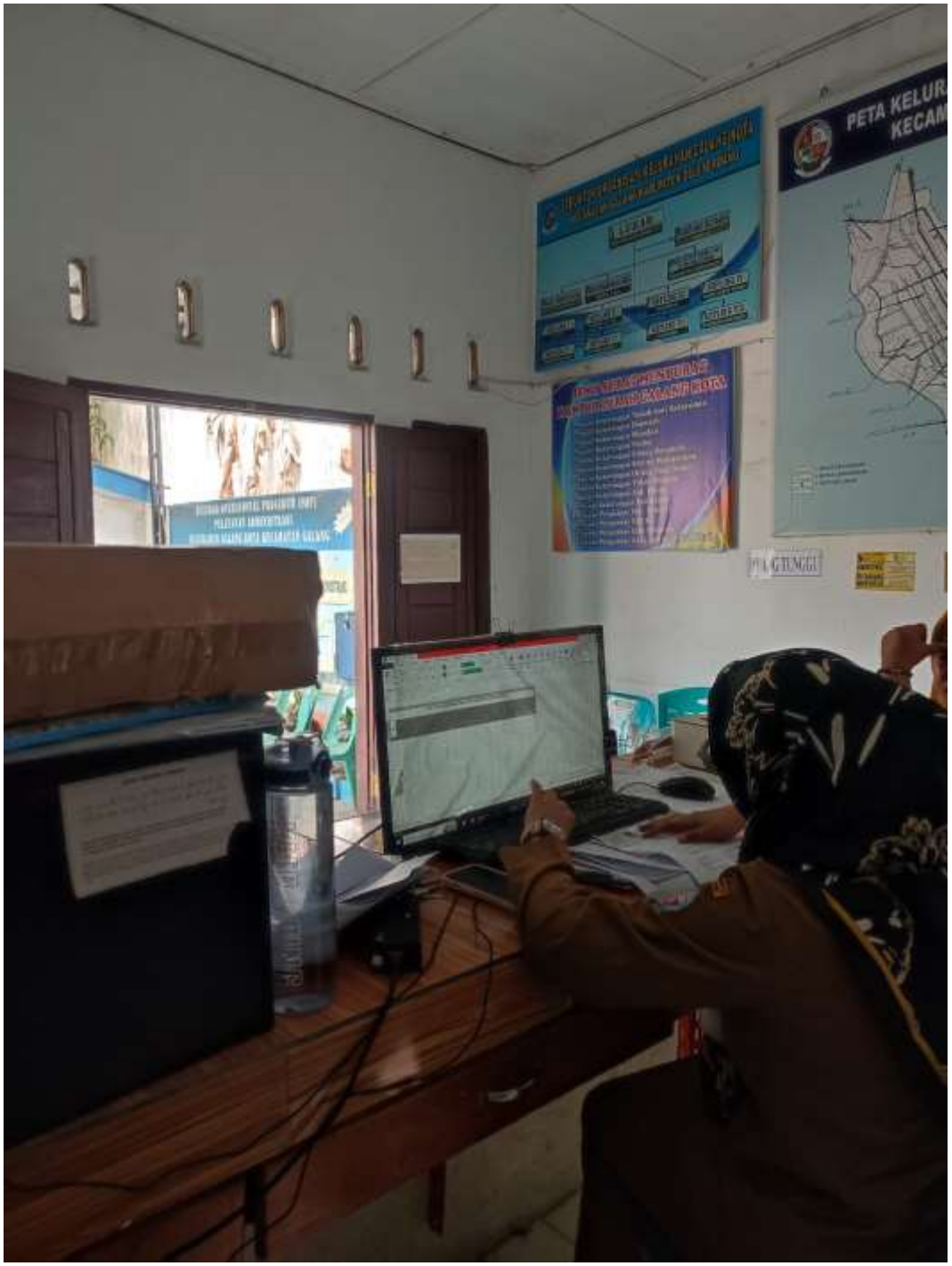

Lampiran X Dokumentasi Dengan Lurah Ibu Merry Luciana V. Pasaribu, S.Stp

Lampiran XI SK- 5

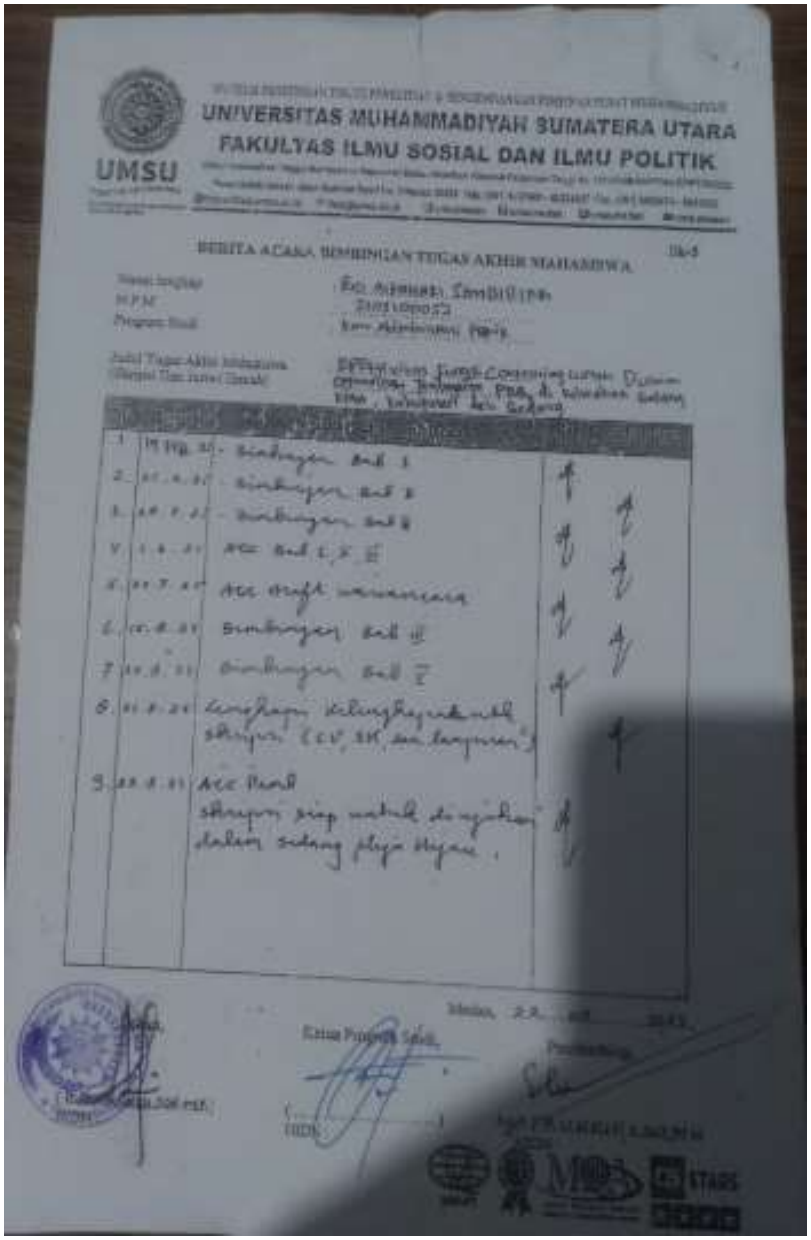

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama Jurusan :
NPM :
Program Studi :

Judul Tugas Akhir Mahasiswa :

1	19 Feb 21	Bimbingan Bab I		
2	01.4.21	Bimbingan Bab II		
3	08.4.21	Bimbingan Bab III		
4	1.4.21	ACC Bab I, II, III		
5	22.7.21	ACC draft wawancara		
6	10.8.21	Bimbingan Bab IV		
7	20.8.21	Bimbingan Bab V		
8	21.8.21	Lengkapi kelengkapan berkas (CV, SK, dan lampiran)		
9	22.8.21	ACC Pendadaran berkas siap untuk dijadikan dalam sidang meja hijau.		

Medan, 22 Agustus 2021

Ketua Program Studi

Pembimbing

Lampiran XII SK- 10

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

No	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19						
20						

Lampiran XIII Loa Keskap

ISSN 2807-6729

JAPK

(JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)

UMSU

LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Mr. Rio Alzahari Sembiring

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "***Efektivitas Fungsi Controlling Lurah dalam Optimalisasi Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Di kelurahan Gulang kota Kabupaten Deli serdang***" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, August 25, 2025

Editor In Chief

(Khairdir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index
Contact: 082160559891